

BAB II

Gambaran Umum

2.1 Gambaran Umum Provinsi Jawa Tengah

Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi di Pulau Jawa yang memiliki kedudukan strategis karena berada di bagian tengah dan berfungsi sebagai jalur penghubung antara wilayah barat dan timur Jawa. Provinsi ini dikenal sebagai pusat kebudayaan Jawa yang masih memegang erat nilai tradisi, bahasa, serta kesenian lokal yang menjadi identitas masyarakatnya. Jawa Tengah juga berperan penting dalam pembangunan nasional melalui kontribusi pada sektor pertanian, industri, perdagangan, dan jasa yang berkembang di berbagai daerah. Keberadaan Kota Semarang sebagai ibu kota provinsi menegaskan peran Jawa Tengah tidak hanya sebagai pusat pemerintahan, tetapi juga sebagai simpul kegiatan ekonomi, pendidikan, dan transportasi. Dengan karakteristik tersebut, Jawa Tengah menjadi salah satu wilayah yang memiliki potensi besar dalam pengembangan sumber daya manusia, pemanfaatan sumber daya alam, serta penguatan tata kelola pemerintahan daerah yang berorientasi pada peningkatan pelayanan publik.

2.1.1 Kondisi Geografis

Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi di Pulau Jawa yang memiliki kedudukan strategis karena berada di bagian tengah pulau. Secara astronomis, wilayah ini terletak antara 5°40' hingga 8°30' Lintang Selatan dan 108°30' hingga 111°30' Bujur Timur. Luas wilayah Provinsi Jawa Tengah mencapai sekitar 3,25 juta hektar atau setara dengan 32.548 km², yang mencakup 29

kabupaten dan 6 kota, dengan pembagian administratif lebih lanjut ke dalam 576 kecamatan serta lebih dari delapan ribu desa dan kelurahan. Batas wilayah Jawa Tengah di sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa, di sebelah selatan berbatasan dengan Daerah Istimewa Yogyakarta dan Samudera Hindia, di sebelah barat berbatasan dengan Provinsi Jawa Barat, serta di sebelah timur berbatasan dengan Provinsi Jawa Timur. Selain itu, wilayah Provinsi Jawa Tengah juga meliputi sejumlah pulau kecil, di antaranya Kepulauan Karimunjawa di Laut Jawa dan Pulau Nusakambangan di selatan. Posisi geografis ini menjadikan Jawa Tengah sebagai wilayah yang penting dalam mendukung keterhubungan antarprovinsi di Pulau Jawa serta menjadi pusat aktivitas pemerintahan, ekonomi, dan kebudayaan.

Provinsi Jawa Tengah berada pada koordinat 5°40' hingga 8°30' Lintang Selatan serta 108°30' hingga 111°30' Bujur Timur, dan mencakup pula wilayah kepulauan seperti Karimunjawa. Dari sisi luas administratif, Kota Magelang tercatat sebagai daerah dengan wilayah terkecil, yakni hanya sekitar 18,56 km². Sebaliknya, Kabupaten Cilacap menjadi daerah dengan cakupan wilayah terluas di provinsi ini. Mengacu pada publikasi Badan Pusat Statistik Jawa Tengah tahun 2023, keseluruhan luas wilayah Provinsi Jawa Tengah mencapai 34.337,48 km².

Tabel 2. 1 Luas Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah 2024

Kabupaten/Kota	Ibu Kota Wilayah	Luas Wilayah (Km ²)	Persentase Terhadap Luas Wilayah
Cilacap	Cilacap	2.323,93	6,77
Banyumas	Purwokerto	1.391,15	4,05
Purbalingga	Purbalingga	805,76	2,35
Banjarnegara	Banjarnegara	1.144,90	3,33
Kebumen	Kebumen	1.334,10	3,89
Purworejo	Purworejo	1.081,97	3,15
Wonosobo	Wonosobo	1.011,62	2,95

Kabupaten/Kota	Ibu Kota Wilayah	Luas Wilayah (Km2)	Persentase Terhadap Luas Wilayah
Magelang	Mungkid	1.129,98	3,29
Boyolali	Boyolali	1.096,59	3,19
Klaten	Klaten	701,50	2,04
Sukoharjo	Sukoharjo	493,53	1,44
Wonogiri	Wonogiri	1.905,75	5,55
Karanganyar	Karanganyar	803,05	2,34
Sragen	Sragen	994,57	2,90
Grobogan	Purwodadi	2.023,85	5,89
Blora	Blora	1.957,29	5,70
Rembang	Rembang	1.037,54	3,02
Pati	Pati	1.572,90	4,58
Kudus	Kudus	447,45	1,30
Jepara	Jepara	1.020,25	2,97
Demak	Demak	977,77	2,85
Semarang	Ungaran	1.019,27	2,97
Temanggung	Temanggung	864,83	2,52
Kendal	Kendal	1.008,12	2,94
Batang	Batang	857,27	2,50
Pekalongan	Kajen	892,91	2,60
Pemalang	Pemalang	1.137,41	3,31
Tegal	Slawi	983,90	2,87
Brebes	Brebes	1.742,81	5,08
Kota Magelang	Magelang	18,56	0,05
Kota Surakarta	Surakarta	46,72	0,14
Kota Salatiga	Salatiga	54,98	0,16
Kota Semarang	Semarang	370,00	1,08
Kota Pekalongan	Pekalongan	46,20	0,13
Kota Tegal	Tegal	39,08	0,11
Jawa Tengah	Semarang	34.337,49	100,00

Sumber : Badan Pusat Statistik (2025)

Pemanfaatan lahan di Provinsi Jawa Tengah sepanjang tahun 2024 menunjukkan dominasi signifikan sektor kehutanan sebagai bagian dari struktur penggunaan wilayah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah tahun 2024 total penggunaan lahan di provinsi tercatat mencapai 3.432.350,31 hektar, yang termasuk kawasan hutan baik negara maupun rakyat.

Jawa Tengah tetap menjadi salah satu provinsi berpenduduk terbesar di Indonesia. Distribusi penduduk tersebar di 29 kabupaten dan 6 kota, dengan Kota Semarang sebagai pusat pemerintahan sekaligus simpul kegiatan ekonomi, pendidikan, dan transportasi. Besarnya jumlah penduduk tersebut membawa konsekuensi penting terhadap perencanaan pembangunan, terutama dalam hal pelayanan publik, penyediaan infrastruktur, dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.

Struktur umur penduduk Jawa Tengah masih didominasi oleh kelompok usia produktif, yakni 15-59 tahun, dengan konsentrasi terbesar pada kelompok usia 25-34 tahun. Kondisi ini mengindikasikan bahwa Jawa Tengah tengah berada dalam fase *bonus demografi*, di mana jumlah penduduk usia produktif jauh lebih besar dibandingkan kelompok usia nonproduktif. Potensi ini dapat menjadi kekuatan utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah apabila diiringi dengan kebijakan yang tepat, terutama pada bidang ketenagakerjaan, pendidikan, dan peningkatan keterampilan. Sebaliknya, tanpa pengelolaan yang baik, kondisi ini berpotensi menimbulkan masalah ketenagakerjaan, pengangguran, dan beban sosial yang semakin kompleks.

Pertumbuhan penduduk Jawa Tengah dalam beberapa tahun terakhir cenderung stabil dengan laju yang melandai. Proyeksi BPS hingga tahun 2035 memperkirakan bahwa jumlah penduduk masih akan terus bertambah, meskipun dengan laju pertumbuhan yang semakin rendah. Fenomena ini menunjukkan adanya pergeseran menuju struktur penduduk yang menua (*aging population*), di mana proporsi penduduk lanjut usia akan semakin meningkat. Dari sisi persebaran, kepadatan penduduk lebih tinggi di wilayah perkotaan seperti Semarang, Surakarta,

dan sekitarnya, sementara daerah pesisir selatan serta kawasan pegunungan memiliki tingkat kepadatan yang lebih rendah. Disparitas ini menuntut adanya pemerataan pembangunan dan distribusi layanan publik agar kebutuhan masyarakat di seluruh wilayah dapat terpenuhi secara optimal.

Selain aspek jumlah dan distribusi indikator sosial ekonomi juga mencerminkan dinamika demografi Jawa Tengah. Berdasarkan data BPS, angka kemiskinan pada Maret 2024 berada pada level 10,47 persen, atau sekitar 3,7 juta jiwa, menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan angka kemiskinan ini menjadi sinyal positif terhadap perbaikan kesejahteraan masyarakat. Hasil *Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2024* menunjukkan adanya peningkatan kualitas pada aspek pendidikan, kesehatan, dan mobilitas sosial. Hal ini menegaskan bahwa dinamika kependudukan di Jawa Tengah tidak hanya terkait dengan jumlah dan pertumbuhan, tetapi juga berhubungan erat dengan kualitas sumber daya manusia yang menjadi faktor penentu keberhasilan pembangunan daerah di masa mendatang.

2.2 Gambaran Umum Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah

Badan Kepegawaian Daerah (BKD) merupakan perangkat daerah yang memiliki fungsi strategis dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang manajemen kepegawaian. Lembaga ini dibentuk berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, yang kemudian disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) serta diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS. BKD diposisikan sebagai unsur

penunjang tugas kepala daerah, yang bertanggung jawab dalam merumuskan kebijakan teknis, melaksanakan pengelolaan administrasi, dan memastikan pengembangan pegawai berjalan sesuai prinsip profesionalitas, netralitas, serta berbasis sistem merit.

Badan Kepegawaian Provinsi Jawa Tengah dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 159 Tahun 2000 serta ditetapkan struktur organisasinya melalui Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah. BKD Provinsi Jawa Tengah memiliki peran penting dalam mendukung Gubernur sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) daerah. Visi yang diusung adalah *“menjadi pengelola manajemen kepegawaian yang unggul dan profesional”*. Untuk mewujudkan visi tersebut, misi yang ditetapkan mencakup perencanaan dan pengembangan pegawai secara objektif, pelaksanaan mutasi dan promosi berdasarkan kinerja, peningkatan kualitas aparatur melalui pengembangan kompetensi, penegakan disiplin serta peningkatan kesejahteraan pegawai, hingga optimalisasi pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah (SIMPEG) yang terintegrasi.



Gambar 2. 2 Kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Tengah

Sumber : BKD Provinsi Jawa Tengah 2025

2.2.1 Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian Provinsi Jawa Tengah

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 67 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah. Badan mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan Bidang Kepegawaian yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah. Adapun Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah sebagai berikut:

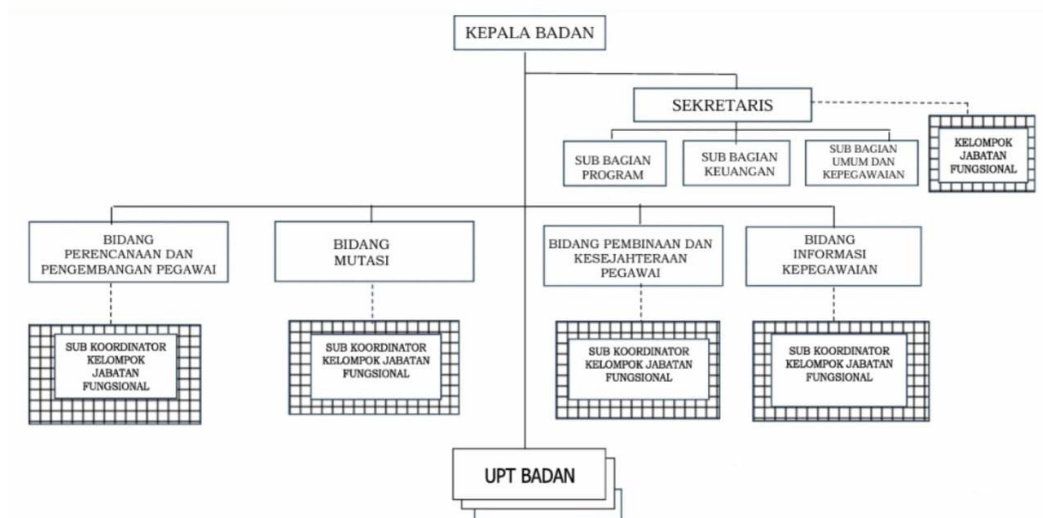
- a. penyusunan kebijakan teknis di Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pegawai, Mutasi, Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai, Penilaian Kompetensi dan Informasi Kepegawaian;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pegawai, Mutasi, Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai, Penilaian Kompetensi, dan Informasi Kepegawaian;

- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pegawai, Mutasi, Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai, Penilaian Kompetensi, dan Informasi Kepegawaian;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pegawai, Mutasi, Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai, Penilaian Kompetensi dan Informasi Kepegawaian;
- e. pelaksanaan dan pembinaan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Badan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.2.2 Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 67 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah. Susunan Organisasi pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut :

- a) Kepala Badan;
- b) Sekretariat;
- c) Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pegawai;
- d) Bidang Mutasi;
- e) Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai,
- f) Bidang Informasi Kepegawaian; dan g. UPT Badan.



Gambar 2. 3 Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah

Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah 2024

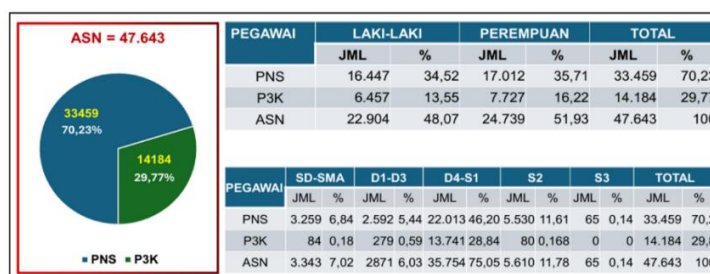
2.3 Kondisi Pegawai Negeri Sipil Provinsi Jawa Tengah

Provinsi Jawa Tengah menghadapi dinamika dalam pengelolaan kualitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Meskipun sebagian besar pegawai telah menempuh pendidikan tinggi, keberadaan ASN dengan latar belakang pendidikan yang masih terbatas menunjukkan perlunya kebijakan pengembangan kapasitas yang berkelanjutan agar kompetensi seluruh aparatur dapat meningkat secara merata. Tahun 2024 Provinsi Jawa Tengah memiliki total ASN sebesar 47.643 orang, yang terdiri dari 33.459 PNS dan 14.184 PPPK, sebagaimana tercantum dalam publikasi resmi *Profil Pegawai Pemerintah Provinsi Jawa Tengah* dari PPID BKD Jawa Tengah. Angka ini mencerminkan struktur kepegawaian yang relatif seimbang antara pegawai berstatus PNS dan PPPK, dengan komposisi dominan pada PNS. Jumlah ini sekaligus menandai tantangan dalam memenuhi kebutuhan ideal ASN, di mana masih terdapat kekurangan yang cukup signifikan bila dibandingkan

dengan kebutuhan formasi yang ideal menurut peta jabatan. Pada saat yang sama, Pemprov Jateng menerima kuota 4.446 formasi CASN untuk tahun 2024, dengan perincian 265 formasi CPNS dan 4.181 PPPK, sebagai bagian dari upaya untuk menutup kekurangan tersebut.

Aparatur Sipil Negara (ASN) di Provinsi Jawa Tengah didominasi oleh pegawai dengan tingkat pendidikan sarjana terapan maupun strata satu (D4–S1) yang mencapai 75,05% dari total pegawai. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas ASN telah memiliki kualifikasi pendidikan tinggi sebagai modal utama dalam mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan dan pelayanan publik. ASN dengan latar belakang pendidikan setingkat SD hingga SMA sebanyak 7,02%, serta lulusan diploma (D1–D3) sebesar 6,03%, yang menunjukkan perlunya peningkatan kompetensi agar kualitas layanan dapat lebih merata.

Pegawai dengan kualifikasi pascasarjana (S2) tercatat sebanyak 11,78%, sementara lulusan doktoral (S3) masih sangat terbatas, yakni hanya 0,14% dari keseluruhan ASN. Proporsi yang relatif kecil pada jenjang pendidikan tinggi ini mencerminkan tantangan tersendiri bagi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam meningkatkan kualifikasi sumber daya manusia aparatur.



Gambar 2. 4 Jumlah Pegawai Provinsi Jawa Tengah 2024

Sumber : PPID Provinsi Jawa Tengah 2024

Struktur Aparatur Sipil Negara (ASN) di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2024 memperlihatkan distribusi usia yang cukup beragam. Kelompok usia terbesar terdapat pada rentang 31–45 tahun dengan jumlah 19.943 pegawai atau 41,86%, disusul oleh pegawai berusia 46–55 tahun sebanyak 15.467 orang atau 32,46%. Sementara itu, pegawai berusia di atas 55 tahun tercatat sebanyak 9.237 orang atau 19,39%, sedangkan kelompok usia muda 10–30 tahun relatif kecil yakni hanya 2.996 pegawai atau 6,29%. Kondisi ini menggambarkan bahwa meskipun mayoritas ASN berada pada usia produktif, terdapat kecenderungan menumpuknya pegawai di kelompok usia menengah dan mendekati pensiun. Hal ini berpotensi menimbulkan masalah regenerasi aparatur, karena jumlah pegawai muda masih terbatas sehingga keberlanjutan kinerja birokrasi dapat terhambat apabila tidak diantisipasi dengan perekrutan dan pembinaan talenta baru.

PNS di Jawa Tengah masih didominasi oleh Golongan III, dengan jumlah mencapai 20.936 pegawai atau 62,57%, diikuti oleh Golongan IV sebanyak 9.108 orang atau 27,22%, dan Golongan II berjumlah 3.287 orang atau 9,82%. Sementara itu, pegawai yang berada pada Golongan I sangat sedikit, hanya 128 orang atau 0,38% dari total keseluruhan. Distribusi ini menunjukkan bahwa sebagian besar pegawai telah berada pada golongan menengah, tetapi penyebaran ke golongan tinggi masih terbatas. Permasalahan yang dapat muncul adalah stagnasi karier, terutama bagi pegawai yang menumpuk di Golongan III namun belum memperoleh kesempatan promosi ke jenjang yang lebih tinggi. Hal ini menuntut adanya strategi manajemen talenta yang mampu membuka ruang pengembangan karier secara lebih merata serta mengurangi risiko ketimpangan jenjang kepangkatan di lingkungan

ASN Provinsi Jawa Tengah, berikut sebagai rincian data berdasarkan usia dan golongan :

PEGAWAI	10-30 TH		31-45 TH		46-55 TH		>55 TH		TOTAL	
	JML	%	JML	%	JML	%	JML	%	JML	%
PNS	1.459	3,06	9.407	19,74	13.614	28,58	8.979	18,85	33.459	70,23
P3K	1.537	3,23	10.536	22,11	1.853	3,89	258	0,54	14.184	29,77
ASN	2.996	6,29	19.943	41,86	15.467	32,46	9.237	19,39	47.643	100

P3K MENURUT KELAS JABATAN			P3K MENURUT TMT			PNS MENURUT GOLONGAN			PEJABAT STRUKTURAL		
P3K/KELAS JABATAN	JML	%	TMT	JML	%	PNS/GOL	JML	%	ESELON	JML	%
V	55	0,39	2021	312	2,20	I	128	0,38	I	1	0,09
VI	0	0,00	2022	9.327	65,76	II	3.287	9,82	II	56	5,19
VII	279	1,97	2023	4.545	32,04	III	20.936	62,57	III	367	34,01
VIII	1	0,01	TOTAL	14.184	100	IV	9.108	27,22	IV	655	60,70
IX	13.658	96,29				TOTAL	33.459	100	TOTAL	1.079	100
X	191	1,35									
TOTAL	14.184	100									

Gambar 2. 5 Jumlah pegawai berdasarkan usia dan golongan

Sumber : PPID Provinsi Jawa Tengah 2024

Mayoritas pegawai berada pada Golongan III, khususnya III/a dengan jumlah mencapai 16.470 orang, disusul oleh golongan lainnya dalam kategori III. Sementara itu, pegawai pada Golongan IV juga cukup signifikan, terutama pada IV/a sebanyak 6.592 orang. Adapun jumlah ASN pada golongan rendah (I dan II) relatif kecil, misalnya golongan I hanya dihuni oleh 128 orang, sedangkan golongan II tercatat 3.622 orang. Dari sisi jenis kelamin, distribusi pegawai cukup seimbang dengan 22.904 laki-laki dan 24.739 perempuan, yang menunjukkan bahwa partisipasi perempuan dalam birokrasi di Jawa Tengah cukup tinggi. Kondisi ini sekaligus menegaskan adanya dominasi pegawai pada level menengah (Golongan III) yang menuntut strategi pengembangan karier agar peluang kenaikan pangkat menuju golongan yang lebih tinggi dapat lebih merata.

Golongan	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki - laki	Perempuan	
I/a	0	0	0
I/b	0	0	0
I/c	18	2	20
I/d	97	11	108
II/a	244	17	261
II/b	196	8	204
II/c	702	720	1.422
II/d	1.052	683	1.735
III/a	7.665	8.805	16.470
III/b	2.079	2.188	4.267
III/c	2.479	2.889	5.368
III/d	3.791	4.889	8.680
IV/a	3.346	3.246	6.592
IV/b	1.002	1.016	2.018
IV/c	173	228	401
IV/d	42	22	64
IV/e	18	15	33
JUMLAH	22.904	24.739	47.643

Gambar 2. 6 Jumlah pegawai berdasarkan golongan dan jenis kelamin

Sumber : PPID Provinsi Jawa Tengah 2024

2.4 Manajemen Talenta di Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah

Penelitian ini berfokus pada pelaksanaan manajemen talenta di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang mencakup proses (*Sourcing, Aligning, Retain, Learn and Develop, Reward*) yang ditempatkan untuk mengisi posisi yang sesuai. Posisi ini disesuaikan berdasarkan kompetensi dan kinerja yang dilakukan melalui mekanisme yang sudah ditetapkan secara efektif dan berkelanjutan.

2.4.1 Tim Pelaksana Manajemen Talenta di Provinsi Jawa Tengah

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 28 Tahun 2021 tim pelaksana terdiri dari:

- 1) Pejabat yang Berwenang;
- 2) Pejabat Pimpinan Tinggi terkait, yaitu Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Pelaksana dan Pejabat Fungsional BKD Provinsi Jawa Tengah yang ditunjuk;

- 3) Tim Penilai Eksternal, yaitu Akademisi dari konsorsium perguruan tinggi yang ditunjuk.

Selain itu, terdapat Tim Penilai Kinerja yang terdiri dari:

- a. Gubernur selaku Penanggung Jawab
- b. Wakil Gubernur selaku Pengarah
- c. Sekretaris Daerah selaku Ketua
- d. Pejabat Pimpinan Tinggi yang berada pada bidang kepegawaian sebagai anggota
- e. Pejabat Pimpinan Tinggi yang berada pada bidang pengawasan internal sebagai anggota
- f. Pejabat Pimpinan Tinggi terkait sebagai anggota
- g. Pejabat Administrator yang berada pada bidang kepegawaian sebagai Sekretaris

Tim Penilai Kinerja memiliki tugas di antara lainnya, yaitu:

- 1) Melakukan Sidang Tim Penilai Kinerja PNS
- 2) Membahas Usulan Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian dari dan dalam Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas

2.4.2 Pelaksanaan Manajemen Talenta di Provinsi Jawa Tengah

Penelitian ini memfokuskan pada pelaksanaan manajemen talenta di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, berikut tahapan dari pelaksanaan manajemen talenta yaitu:

1. *Sourcing* atau sumber

Proses disiplin akuisisi bakat yang difokuskan pada saat mengidentifikasi bakat, mempromosikan nilai-nilai untuk menarik individu-individu berbakat agar

melamar untuk bergabung dengan organisasi. Akuisisi talenta merupakan proses menarik, merekrut, memilih, dan mempekerjakan talenta dalam suatu organisasi. Organisasi menentukan posisi yang akan diisi melalui perencanaan tenaga kerja, melakukan identifikasi potensi kemampuan dan menentukan kandidat pegawai sesuai kualifikasi.

2. *Aligning* atau Menyetarakan

Proses dalam menyatukan pegawai dengan tujuan organisasi serta kebudayaan organisasi dengan cara memberikan diklat kepada pegawai baru sehingga efektif dan dengan kerjasama pimpinan dengan pegawai mencapai tujuan.

3. *Retain* atau Memelihara

Strategi untuk memelihara atau mempertahankan karyawan yang memiliki talenta didalam organisasi. *Retensi* Talenta mengacu pada inidiividu-individu yang terampil dan berbakat dalam organisasi jangka waktu yang lama. Menarik dan mempekerjakan individu-individu berbakat adalah hal yang baik untuk sebuah organisasi, namun yang paling penting adalah mempertahankan talenta dalam sebuah organisasi, sehingga organisasi merancang berbagai strategi untuk mempertahankan talenta dalam jangka waktu yang lama. Beberap strategi ini termasuk penyeleksian pegawai internal.

4. *Learn and Develop Talent* atau Belajar dan mengembangkan talenta

Proses karyawan untuk mempelajari dan mengembangkan kemampuannya untuk mendapatkan karir yang lebih baik dalam organisasi. Pengembangan talenta dapat ditempuh melalui berbagai strategi, antara lain perencanaan karier, peningkatan kompetensi dengan pengembangan pelatihan dengan diklat untuk

mrngembangkan talenta. Upaya ini diselaraskan dengan bidang atau aspek yang dianggap prioritas untuk dikembangkan pada kelompok *talent pool*. Dalam pelaksanaannya, BKD Provinsi Jawa Tengah juga menjalin kolaborasi dengan sejumlah lembaga yang memiliki reputasi dan keahlian dalam mendukung program pengembangan talenta ASN. Organisasi menggunakan program-program seperti perencanaan karir pegawai, pengembangan keahlian dengan pemberian diklat terencana.

5. *Reward* atau Penghargaan

Hasil implementasi dengan tujuan untuk memberikan imbalan kepada pegawai secara adil, konsisten, serta sejalan dengan nilai pegawai di mata organisasi. Penghargaan yang diberikan sesuai dengan kinerja dan monitoring hasil evaluasi.